

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak maka perlu peningkatan pembangunan untuk menopang kesejahteraan penduduknya. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat yang saling bersinergi dalam proses pembangunan, termasuk di bidang kesejahteraan sosial.

Akan tetapi, melihat pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat berada dalam lingkaran kemiskinan maka perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin dipelihara oleh Negara”. Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap permasalahan fakir miskin atau kemiskinan di Negeri ini.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah turut ambil bagian dan bertanggung jawab dalam upaya pengentasan kemiskinan (Pasal 27), berikutnya Pasal 20 mengatakan bahwa, penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin serta memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengembalian kebijakan publik yang menjamin penghargaan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.

Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan dan memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam Millenium Development Goals (MDGs). Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan (Faturochman).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang digambarkan dengan Garis Kemiskinan (GK).

Garis Kemiskinan adalah standar jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan makanan (setara dengan 2.100 kalori perkapita perhari) dan kebutuhan pokok non makanan. Data BPS publikasi terakhir september tahun 2015 menunjukkan garis kemiskinan (perkapita/perbulan) untuk tingkat nasional sebesar Rp. 344.809, Jawa Barat Rp. 366.137, dan Kota Bandung Rp. 293.802.

Jumlah penduduk miskin Kota Bandung pada tahun 2010 sebanyak (33,87 %), tahun 2011 (32,12 %), dan tahun 2012 (30,84 %), tahun 2013 (30,94%), Tahun 2014 (27,63%), Tahun 2015 (25,24%). Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun ke tahun, namun tidak menunjukkan angka yang signifikan.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penelitian ini berjudul pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin dalam meningkatkan pembangunan masyarakat Kelurahan Neglasari hal yang melatar belakangi memilih judul ini dikarenakan Kelurahan Neglasari terbilang masyarakat kurang sejahtera yang mayoritas penduduknya bermata pencahariaan nelayan. Desa Humene merupakan daerah pinggiran pantai dan berpenduduk mayoritas beragama islam, Desa Humene juga penerima manfaat dari pemerintah salah satunya dari Kementrian Sosial pada Program Keluarga Harapan – Kelompok Usaha Bersama (KUBE) melalui Dinas Sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan potensi masing-masing keluarga miskin.

Namun untuk saat ini program KUBE diganti menjadi Program Keluarga Harapan (PKH), yang merupakan singkatan dari "Program Keluarga Harapan," adalah sebuah inisiatif yang digagas oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Program ini menawarkan dukungan finansial berupa bantuan uang tunai secara berkala kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu. Salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan ini adalah bahwa anggota keluarga yang berusia sekolah harus hadir secara aktif di sekolah, dan seluruh anggota keluarga harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.

Tujuan pokok dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan akses keluarga miskin ke layanan pendidikan dan kesehatan. Melalui bantuan ini, pemerintah berharap dapat membantu keluarga yang kurang beruntung agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dan memastikan bahwa keluarga-keluarga tersebut dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk masa depan yang lebih baik.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu dari berbagai program bantuan sosial yang ada di Indonesia, dan tujuannya adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Dengan memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang membutuhkan, pemerintah berusaha memberikan peluang yang lebih adil bagi semua warga negara untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Sebagai hasilnya, program ini telah membantu banyak keluarga miskin di Indonesia untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan mendapatkan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH), adalah salah satu tonggak penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang terpinggirkan secara ekonomi. Program ini bukan hanya sekadar bantuan finansial tetapi juga mencerminkan komitmen yang mendalam dari pemerintah dalam memberikan peluang yang lebih adil kepada warga negara yang membutuhkan.

Dengan mengagas Program Keluarga Harapan (PKH) , pemerintah telah menciptakan suatu sistem bantuan yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial reguler kepada keluarga yang memenuhi sejumlah kriteria ketat. Salah satu syarat utama program ini adalah

bahwa anggota keluarga yang berusia sekolah harus hadir secara aktif di lembaga pendidikan, dan seluruh anggota keluarga harus menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Dengan cara ini, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan tetapi juga untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak dan masyarakat memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan.

Selain manfaat langsung yang diterima oleh keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), program ini juga bertujuan untuk memberikan dorongan ekonomi dan sosial yang lebih besar. Dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih baik bagi warga negara yang kurang beruntung untuk membangun fondasi yang lebih stabil dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Program Program Keluarga Harapan (PKH) juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem bantuan yang responsif dan inklusif. Proses verval (verifikasi dan validasi) yang dilakukan oleh pihak berwenang membantu memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan mengintegrasikan data terkini dari survei dan dokumentasi visual, program ini dapat memantau perubahan dalam keadaan keluarga penerima manfaat dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) bukan hanya sebuah program bantuan sosial tetapi juga simbol dari upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), banyak keluarga miskin di Indonesia telah mendapatkan akses yang lebih baik ke pendidikan dan

layanan kesehatan, membantu mereka melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan berdaya.

Sejarah perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH) mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di negara ini. Program Keluarga Harapan (PKH) , yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 sebagai langkah strategis dalam mengatasi masalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial.

Pada awalnya, program ini melibatkan uji coba terbatas di beberapa kabupaten untuk mengidentifikasi kelemahan dan keberhasilan pelaksanaannya. Hasil dari pengujian ini digunakan untuk menyempurnakan peraturan dan pelaksanaan program sebelum Program Keluarga Harapan (PKH) diperluas secara nasional pada tahun 2008. Pada saat itu, Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu program bantuan sosial terbesar di Indonesia dan mencakup seluruh provinsi dan kabupaten di negara ini.

Seiring berjalannya waktu, Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami perkembangan yang signifikan. Program ini semula fokus pada anak-anak di keluarga miskin, dengan syarat bahwa mereka harus hadir di sekolah dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Namun, sasaran program ini kemudian diperluas untuk mencakup ibu hamil dan lansia dalam keluarga penerima manfaat, dengan keyakinan bahwa pendekatan yang lebih holistik akan memberikan dampak yang lebih besar pada kesejahteraan keluarga.

Perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) . Seiring dengan kemajuan teknologi, program ini mengadopsi

sistem pembayaran yang lebih efisien, termasuk transfer langsung ke rekening bank penerima manfaat. Ini membantu meminimalkan birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 membawa tantangan baru bagi Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah Indonesia merespons dengan memperluas cakupan program ini dan meningkatkan besaran bantuan finansial kepada penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk membantu mereka mengatasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi.

Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai banyak kesuksesan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan, program ini juga menghadapi berbagai tantangan. Pemutakhiran data secara akurat, pengelolaan logistik, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program ini.

Dalam proyeksi masa depan, Program Keluarga Harapan (PKH) akan terus berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan. Program ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil, serta memberikan peluang bagi keluarga miskin untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Sejarah panjang perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah cerminan dari komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadirkan perubahan positif dalam kehidupan warga negaranya.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Pelayanan Kelurahan Neglasari dalam upaya meningkatkan pembangunan masyarakat desa bagi keluarga miskin melalui Program

Keluarga Harapan (PKH) . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menyajikan suatu gambaran dari suatu keadaan, latar belakang sosial serta hubungan sosial (Neuman:2006).

Kesejahteraan sosial dapat terjadi di daerah manapun dan disebabkan oleh berbagai hal yang salingterkait. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah kesejahteraan sosial, di samping faktor internalada juga faktor eksternal. Ada kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses terhadap kesempatan sosial dan ekonomi, sehingga mereka menjadi rentan terhadap masalah sosial ini. Faktor eksternal meliputiintervensi pemerintah dan pihak swasta. Intervensi program pemerintah yang bertujuan baik, menyebabkan orang menjadi tergantung pada pemerintah. Hal ini menimbulkan masalah yang sebelumnya tidak ada.Rumah Sosial dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri melalui upaya terkoordinasi di tingkatdesa. Melalui penelitian ini, dapat dilihat seberapa jauh Rumah Sosial berperan dalam meningkatkankesejahteraan masyarakat pedesaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dandianalisis dengan menggunakan pendekatan partisipatif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan danwawancara mendalam, selain itu dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan informan kunci sebagaisumber data dan informasi penelitian. Temuan penelitian ini menyatakan bahwa keberadaan Rumah Sosial,dapat membawa program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. (Huruswati, I. 2015).

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi dan upaya memfokuskan kembali pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial di desa/kelurahan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pusat Kesejahteraan Sosial yang hanya ditumbuhkan oleh Kementerian Sosial RI sebanyak 300

Puskesmas ternyata telah berkembang sebanyak 6.169 pada tahun 2019 yang tersebar di seluruh Indonesia. Berkembangnya Pusat Kesejahteraan Sosial didukung juga dengan pembiayaan dana desa dan pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan Pusat Kesejahteraan Sosial berupa pemutakhiran data, menangani dan menyelesaikan keluhan dan melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin. Jika keluhan tersebut tidak bisa diselesaikan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial maka akan dirujuk kepada pengelola layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu. Keluhan penduduk miskin dan rentan miskin melalui Pusat Kesejahteraan Sosial lebih banyak dapat diselesaikan atau dirujuk ke program yang dikelola oleh desa, pemerintah daerah, masyarakat maupun swasta dibanding dengan penyelesaian yang dilakukan oleh program Kementerian Sosial RI. Pelayanan Pusat Kesejahteraan Sosial hanya terfokus pada upaya perlindungan dan penanggulangan kemiskinan, ada pembatasan sasaran penerima manfaat yaitu hanya warga miskin dan rentan miskin dengan layanan cenderung pengurusan administrasi penduduk miskin dan rentan miskin. Penelitian ini merekomendasikan agar Pusat Kesejahteraan Sosial memfokuskan kembali dengan cara tidak hanya melayani warga miskin dan rentan miskin serta tidak hanya fokus pada penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial akan tetapi juga rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial. Kata Kunci: pusat kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, desa, kelurahan. (Habibullah, H. 2020).

Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Layanan Bagi Keluarga Miskin Di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung Banyaknya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta PMKS sehingga perlu diatasi dan ditekan untuk mengembangkan Kelurahan Neglasari agar menjadi warga yang Sejahtera Mandiri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Neglasari telah didukung dengan keberadaan Puskesmas untuk memfasilitasi pelayanan bagi masyarakat dalam perolehan hak dan bantuan program untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya seperti pendidikan,

kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hadirnya Puskesmas diharapkan merubah pelayanan yang awalnya rumit, prosesnya lama, menjadi cepat dan mudah dengan sistem aplikasi secara online, dengan menerapkan Sistem Layanan Rujukan dan Terpadu. Melalui Puskesmas ini pula masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Kecamatan maupun dinas terkait, cukup diurus di Kantor Desa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemberian layanan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan secara gratis dan praktis, transparan, mudah diakses, pelayanan yang cepat serta didukung dan diapresiasi oleh masyarakat. Sehingga siap melayani untuk masyarakat tanpa repot dengan urusan birokrasi. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah kordinator puskesmas, kepala desa, tksk dan masyarakat penerima manfaat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti merupakan instrument utama dalam melakukan penelitian dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Tekhnik analisis data yang digunakan adalah analisis data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Tringulasi dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data dengan menggunakan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

- 1) Kehadiran Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesmas sangat membantu khususnya untuk memudahkan warga miskin dan rentan yang ada di wilayah tersebut mengidentifikasi kebutuhan mereka untuk dihubungkan dengan program dan layanan yang ada di Pemerintah desa sampai Pusat. Mereka juga bisa dengan cepat mengidentifikasi keluhan atas program dan layanan yang mereka terima dan memastikan bahwa keluhan – keluhan mereka tertangani dengan baik.

- 2) Kendala yang dikeluhkan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesmas adalah Sumberdaya Manusia (SDM), Keberadaan Puskesmas yang masih di salah tafsirkan oleh masyarakat karena beranggapan bahwa Puskesmas adalah lembaga yang memberikan program

padahal Tupoksinya sebagai pengupdate data penerima manfaat.

3) Untuk upaya peningkatan, Puskesmas akan terus memperbaiki Data penerima manfaat juga akan terus bersosialisasi agar masyarakat memahai wilayah kerja Puskesmas dan terus berkordinasi kepada stakeholder untuk duduk bersama menyamakan persepsi atas kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama dengan tujuan yang sama (Muhammad Sidiq 2021).

Berdasarkan uraian di atas, baik secara empirik fenomena yang terjadi maupun secara konseptual, penanggulangan dan pemberdayaan masyarakat miskin melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diperlukan sinergitas antar mereka. Sinergitas atau keterpaduan di antara stakeholder baik dari perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Maka Judul Penelitian ini adalah “Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Kelurahan Neglasari Kec. Cibeunying Kota Bandung.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Miskin Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Pembatasan Masalah Kelurahan Neglasari Kec. Cibeunying Kota Bandung.

Dalam hal ini, peneliti membatasi masalah khusus pada Program Keluarga harapan yakni Kelompok Usaha Bersama :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga miskin di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambatan di pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi masyarakat miskin di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler

3. Bagaimana implikasi teoritis dan praktis dalam pengembangan ilmu kesejahteraan sosial

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan keberadaan Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler dalam upaya meningkatkan pembangunan masyarakat desa bagi keluarga miskin.
2. Mengetahui efektivitas Kelompok Usaha Bersama yang merupakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin di Kelurahan Neglasari Kecamatan Cibeunying Kaler

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dilihat dari dimensi teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk memperkaya khasanah ilmu di bidang Kesejahteraan Sosial dan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

#### **2. Manfaatn Praktis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung umumnya dan Pemerintah Kelurahan Neglasari Kec. Cibenyng Kota Bandung. berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan masyarakat desa